

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis menyertakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai bukti yang relevan. Penelitian terdahulu ini penulis ambil jurnal yang telah ada dari internet. selain itu penelitian terdahulu ini bisa menjadi referensi yang relevan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dibawah ini dapat dilihat daftar penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian, Nama Penelitian, dan tahun penelitian	Metode Analisis Data yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo) (Multazam Fadli Masruhim, 2015).	Analisis interaktif	Menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Maron Kulon adalah gaya kepemimpinan demokratis. pelaksanaan program pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa adalah tidak otoriter; kepala desa mengumpulkan orang-orang pertama yang terlibat dalam proses pelaksanaan program pembangunan kemudian diadakan pertemuan yang akhirnya menentukan keputusan yang disepakati bersama.
2	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso (Herlan Lagantodo, 2019).	Analisis interaktif	menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso adalah gaya konsultatif, partisipasi, demokratis dan motivator.

3	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Sartono, 2018).	Analisis interaktif	Menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan Kepala Desa Latugho terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi.
4	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Banaran (Dyan Septi, 2021).	Analisis interaktif	Pola kepemimpinan kepala desa yang melibatkan masyarakat dalam program kerjanya. Kepala desa juga menjalankan agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Respon positif yang di dapat kepala desa pun tinggi. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan legitimasi yang tinggi pula dari masyarakat.
5	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (<i>Leadership Style of Village Heads in Village Infrastructure Development</i>) (Danny Kusuma Wijaya, 2022).	Analisis induktif	Kemampuan pengambilan keputusan kepala desa memiliki peran dalam menentukan suatu keputusan. Dalam keterampilan komunikasi, kepala desa belum memiliki komunikasi yang baik dengan para pemuda di Desa Plabuhanrejo. Sedangkan kemampuan mengontrol bawahan, kepala desa memberikan sanksi bagi bawahan yang tidak

Sumber : (Penelitian terdahulu)

Dalam penelitian ini terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah tersaji dalam tabel diatas. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh (Multazam Fadli Masruhim, 2015); (Herlan Lagantodo, 2019); (Sartono, 2018); (Dyan Septi, 2021), adalah pada variabel dependen yang digunakan peneliti yaitu variabel pembangunan, serta terdapat persamaan pada variabel independen pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, sedangkan metode analisis data yang digunakan tidak sama yaitu Analisis interaktif dan penelitian yang dilakukan oleh (Danny Kusuma Wijaya, 2022), menggunakan Analisis induktif sedangkan di penelitian ini peneliti

menggunakan Analisis fenomologi, maka adanya perbedaan di penelitian ini yaitu di penggunaan metode analisis data.

2.2 Landasan Teori

Dalam upaya pembahasan penelitian, diperlukan paradigma atau pandangan yang benar dan jelas, guna memperoleh jawaban dan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Menurut (Bogdan & Biklen, 2009), mengartikan bahwa “paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, atau proposi mengarahkan cara berfikir dan penelitian”. Pada dasarnya teori merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian. Peran teori dalam sebuah penelitian adalah untuk menggambarkan fenomena yang menjadi pusat penelitian.

Menurut (Snelbecker, 2009), mendefinisikan teori adalah “sebagai perangkat proposisi yang berintraksi secara sintaksi yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan yang lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena sosial yang muncul di masyarakat”. Sehubungan dengan hal tersebut maka berbagai teori yang ada akan dibuatkan menjadi satu konsep yang lebih kecil yaitu sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan pengertian teori dan kosep di atas penulis ingin menganalisa gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam penelitian ini, konsep dasar yang digunakan adalah Konsep Desa, Konsep Gaya Kepemimpinan dan Konsep Pembangunan Desa.

2.3 Desa

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.

2.3.1 Kewenangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005 susunan organisasi Pemerintah Desa menyebutkan bahwa urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan Pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undang diserahkan kepada Desa.

2.3.2 Tugas Pemerintah Desa

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai tugas dan kewenangan desa sesuai pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kemudian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Selain dari itu, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif,
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

2.4 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang di inginkan sang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang melaksanakan kepemimpinan. Kepemimpinan merujuk pada proses kegiatan, sedang pemimpin merujuk pada pribadi seseorang.

Menurut (Salam, 2002), ada tiga variabel penting kepemimpinan yaitu sebagai berikut.

- a. Pemimpin sebagai orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan.
- b. Pengikut sebagai sekelompok orang yang berkedudukan mengikuti pemimpin.
- c. Situasi sebagai kondisi atau keadaan yang melingkupi kepemimpinan tersebut.

2.4.1 Gaya Kepemimpinan

Menurut (Nugroho, 2021), Dalam Bukunya yang Berjudul “Kepemimpinan Pemerintahan Desa” menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahui gaya kepemimpinan seorang kepala desa adalah sebagai berikut.

a. Gaya Demokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya Demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan di anjurkan berdiskusi tentang

keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama.

b. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan Pemerintahan Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (*rule*), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku, tetapi sederhana (*zakelijk*). Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralistis, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (*irrational*), taat dan patuh (*obedience*) kepada aturan (*dicipline*) serta terstruktur dalam kerja.

c. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya Otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (*coercive power*). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintah sedang memiliki kekuasaan saja

kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya. Untuk itu selain gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku. Dengan melihat undang-undang yang baru yaitu undang-undang desa No.6 tahun 2014 yang mana dengan jelas dijabarkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin di desa, tempat ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pertumbuhan pembangunan di desa.

2.4.2 Indikator Kepemimpinan

Indikator Kepemimpinan teori *Path Goal* menurut (Koontz, 2003), yaitu sebagai berikut.

a. **Kepemimpinan Pengarah (*Directive Leadership*)**

Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus disesuaikan dan standar kerja, serta memberikan bimbingan/arahan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya aspek perencanaan, organisasi, koordinasi dan pengawasan.

b. Kepemimpinan Pendukung (*Supportive Leadership*)

Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan menunjukkan tentang keberadaan mereka, status dan kebutuhan-kebutuhan pribadi sebagai usaha untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang menyenangkan di antara anggota kelompok. Kepemimpinan pendukung (*supportive*) memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja bawahan pada saat mereka sedang mengalami frustrasi dan kekecewaan.

c. Kepemimpinan Partisipatif (*participative leadership*)

Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan.

d. Kepemimpinan Berorientasi Prestasi (*Achievement-Oriented Leadership*)

Gaya kepemimpinan dimana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin serta terus-menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut.

2.5 Pembangunan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dalam satu masyarakat biasanya diarahkan pada pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat yang bersangkutan, baik peningkatan kapasitas akibat proses pemberdayaan masyarakat

sendiri maupun hasil material atau kesejahteraan fisik (Soetomo, 2010). Dalam meningkatkan efektivitasnya, pemerintah idealnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga akhirnya dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan program pembinaan masyarakat desa sebagai proses yang berlangsung di desa dan tak terpisah dari pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan desa terus dipacu menuju modernitas dalam mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan melalui desentralisasi dan demokratisasi.

Menurut (Dwipayana & Eko, 2003), desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan di antara daerah-daerah dengan pemerintah pusat, terutama di tingkat desa. Dalam konteks itu, keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan perlu ditingkatkan dengan menekankan pada peran kepala desa dalam kerjasama dengan masyarakat daerah. Peran ini penting karena keterlibatan tersebut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas maupun program yang dijalankan pemerintah pusat. Karena itu, kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian.

Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat. Hal ini didasarkan pada

paham bahwa pemilik otonomi daerah bukan pemerintah, yang menikmati kekuasaan, kewenangan dan kekayaan, melainkan masyarakat lokal (Roziki, 2005).

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis prinsip tata pengelolaan yang baik (*good governance*) adalah adanya kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam bidang penyelenggaraan pembangunan Desa. Indikator ini tercapai bila pemerintah dapat membangun mekanisme pemerintahan demokratis yang tanggap pada kebutuhan daerah. Dalam rangka itu, perlu diberi peningkatan tekanan lebih banyak kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat pada tingkat lokal, dalam hal ini pemerintahan desa.

Melalui proses desentralisasi dan demokratisasi tingkat desa, aparat pemerintah desa dapat menjadi salah satu pemberi pelayanan bagi masyarakat dan idealnya bisa membenahi berbagai aspek dari administrasi, hukum, tata naskah maupun fisik. Mereka dapat mempersiapkan strategi dan mengembangkan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, murah, dan berkualitas, serta melibatkan adanya partisipasi masyarakat. Karena kinerja seperti itu sangat ditentukan salah satunya oleh responsivitas penyedia pelayanan, maka kinerja aparat pemerintah desa akan berkembang bilamana mereka mau menerima aspirasi dan tuntutan dari berbagai pengguna pelayanan publik tanpa sikap dan perilaku diskriminatif. Mereka harus mengerti dan selalu tanggap terhadap hal-hal yang diinginkan masyarakat, terkait dengan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tanpa terpengaruhi kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif aparat pemerintah desa sendiri.

Menurut (Syuroh, 2009), upaya perwujudan ke arah tatakelola yang baik dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan dan dilakukannya upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan, sehingga akhirnya dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek pemerintah, tata kelola yang baik dapat dilihat melalui aspek:

- a. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
- b. Kompetensi dan transparansi administratif, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan modal administratif serta keterbukaan informasi.
- c. Desentralisasi, yang mencakup desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
- d. Perciptaan dasar yang kompetitif, melalui penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain di sektor swasta deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa di era otonomi daerah. Responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi agenda yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pejabat pada tingkat ini, selain dalam upaya menjalankan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya masyarakat

mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Harus terjadi kesesuaian antara kepentingan aparat sebagai penyedia pelayanan publik dan aspirasi masyarakat, tanpa tercampuri kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif pejabat itu sendiri. Implikasinya adalah jika masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam berurusan dengan penyedia pelayanan dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, maka kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa ini secara keseluruhan akan menjadi baik dan memuaskan.